BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

PERPUSTAKAAN IGI · STKS · STIE · IGI

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH No. 41 pada tanggal 11 Maret 1996 dan telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK nomor C2-8336.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XIII menjadi PT.Perkebunan Nusantara VIII.

Sebelumnya berdirinya PTP.Nusantara VIII di Jawa Barat ini merupakan pengambilalihan perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dan tindakan ini disusul dengan Nasionalisasi Perkebunan berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Tindakan dari nasionalisasi tersebut di dasari oleh :

1. Bahwa tindakan pengambilalihan perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah RI dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan Konfrensi Meja Bundar (KMB).
2. Bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan KMB dan perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang

berada di wilayah RI berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik negara.

3. Bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan negara.

Secara historis kronologis perusahaan perkebunan eks milik Belanda di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Periode 1950-1957

Terdapat 113 kebun, masing-masing milik dari 17 perusahaan. Perkebunan milik Belanda dan milik asing di Jawa Barat berangsung-angsur diperbaharui sebagai akibat kerusakan pada masa pendudukan Jepang.

Perusahaan perkebunan tersebut diatur dan dikelola dengan sistem *"Directie Administrasi"*. Setiap Direksi Administrasi mengelola beberapa perkebunan.

Periode 1957-1960

Dalam rangka Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan eks milik Belanda, pengelompokkan perkebunan mengalami penyederhanaan dari 113 kebun menjadi 99 kebun yang selanjutnya di bentuk PPN-Baru Cabang Jawa Barat.

1. Unit Bandung I - 21 Kebun
2. Unit Bandung II - 21 Kebun
3. Unit Bandung III - 17 Kebun
4. Unit Jakarta I & II - 40 Kebun

Periode 1960-1963

Pada tahun 1960 diadakan penggabungan perusahaan dalam lingkup PPN-Lama dan PPN-Baru (eks milik Belanda) dengan satu lembaga Badan Pimpinan Umum Urusan Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN) di Jakarta dengan perwakilan BPU-PPN daerah.

1. PPN Kesatuan Jawa Barat I (Eks Unit Bandung I)
2. PPN Kesatuan Jawa Barat II (Eks Unit Bandung II)
3. PPN Kesatuan Jawa Barat III (Eks Unit Bandung III)
4. PPN Kesatuan Jawa Barat IV (Eks Unit Jakarta I)
5. PPN Kesatuan Jawa Barat V (Eks Unit Jakarta II)

Periode 1963-1968

Pada tahun 1963 diadakan lagi reorganisasi dengan tujuan agar pengelolaan perkebunan lebih tepat guna, yaitu :

1. PPN Aneka Tanaman VII (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – teh dan kina
2. PPN Aneka Tanaman IX (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – teh dan kina
3. PPN Aneka Tanaman VIII (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – teh dan kina
4. PPN Aneka Tanaman X (sebagian eks Jabar II dan Jabar III) – teh dan kina
5. PPN Aneka Tanaman XI (sebagian eks Jakarta I dan Jakarta II) – karet
6. PPN Aneka Tanaman XII (sebagian eks kesatuan Jabar I) – karet

Periode 1968-1971

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kebun-kebun yang ada disederhanakan menjadi 68 kebun dalam bentuk Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), yaitu :

1. PNP XI berkedudukan di Jakarta, yang meliputi perkebunan-perkebunan eks PPN Karet X dan XI (24 perkebunan).
2. PNP XII berkedudukan di Bandung, yang meliputi beberapa perkebunan eks Karet XI, XII dan sebagian eks Antan VII dan VIII (24 perkebunan).
3. PNP XIII berkedudukan di Bandung, yang meliputi beberapa perkebunan eks Karet XII, eks Antan IX dan X (20 perkebunan).

Selain itu di tingkat pusat dibentuk Badan Khusus Urusan PNP (BKU-PNP) sebagai pengganti BPU per komoditi yang merupakan suatu badan yang membantu Menteri Pertanian dalam melaksanakan tugas pengawasan dan bimbingan PNP.

Di daerah didirikan Perwakilan BKU-PNP wilayah menurut propinsi :

1. Perwakilan BKU-PNP Wilayah I meliputi PNP X (Sumatra Utara).
2. Perwakilan BKU-PNP Wilayah II meliputi PNP X (Sumatra Selatan dan Palembang), PNP XI s.d XIV (di Jawa Barat).
3. Perwakilan BKU-PNP Wilayah III meliputi PNP XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX (Jawa Tengah).
4. Perwakilan BKU-PNP Wilayah IV meliputi PNP XX s.d XXVIII (Jawa Timur).

Periode 1971-1996 (10 Maret 1996)

Sejak tahun 1971, PNP XI, PNP XII, dan PNP XIII berubah status menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan-PTP (Persero).

Periode 1994 sampai dengan sekarang

Pemerintah melalui Departemen Pertanian mengambil langkah-langkah kond\silidasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama (penggabungan)

   Tahap awal penggabungan kebun-kebun PT. Perkebunan XI, PT. Perkebunan XII dan PT. Perkebunan XIII dimulai sejak 1 April 1994 dan berlangsung sampai tanggal 10 maret 1996. Pada tahap ini PTP dikelompokkan berdasarkan wilayah dimana PTP bersangkutan berada. 26 PTP yang ada dikelompokkan menjadi 9. Semula jumlah PTP yang dikelompokkan akan ditambah dengan 2 (dua) buah lagi, yaitu Wilayah Propinsi Riau dan Jambi serta wilayah propinsi Kalimantan.

2. Tahap kedua (peleburan)

   Sebagai kelanjutan dari konsilidiasi PTP, dilakukan peleburan BUMN Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan. PT. Perkebunan Jawa Barat yang semula terdiri dari PTP XI, PTP XII dan PTP XIII sejak 11 Maret 1996 melalui PP No.13 tahun 1996 dilebut menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII yang berkedudukan di Jl. Sindang Sirna No.4 Bandung.

Dan latar belakang peleburan ini yaitu :

a. Lebih memanfaatkan misi BUMN sebagai dinamisator pembangunan dan modernisasi sektor pertanian.

b. Mempertajam skala usaha dan konsilidasi wilayah kerja untuk memanfaatkan peluang usaha yang efisien.
c. Memperkuat komposisi usaha, baik horizontal maupun vertikal yang menjamin daya tahan terhadap gejolak pasar.
d. Meningkatkan kemampuan usaha integral antara industri hulu dan industri hilir.
e. Sehat secara finansial.

Maksud dan tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari perusahaan ini yaitu turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya di Sub Sektor Kehutanan/Perkebunan dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan kepada azas :

a. Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan Nasional melalui upaya peningkatan produksi dan pemasaran dari berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun ekspor, sekaligus dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
b. Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan tarap hidup petani dan karyawan pada khususnya.
c. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, air dan kesuburan tanah.

Misi dan Visi

Misi perusahaan ini adalah :

1. Sebagai BUMN, PTPN VIII mempunyai tugas utama membangun perkebunan berdasarkan kepada Tri Dharma Perkebunan.
2. Memberikan kontribusi dalam :
   - Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
   - Meningkatkan pendapatan nasional serta kesejahteraan bangsa.

Visi perusahaan adalah BUMN perkebunan yang tangguh dalam bidang agrobisnis dan agroindustri yang memuaskan stake holder (customer, pemilik saham dan karyawan) serta berwawasan akan lingkungan.

3.1.2 Kegiatan Usaha PTP. Nusantara VIII

Kegiatan usaha PTP.Nusantara VIII ini meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan/produksi dan penjualan komoditi perkebunan Teh, Karet, Kina, Kakao, Kelapa sawit dan Gutta Percha.

Pusat kegiatan usaha berada di Kantor Direksi dengan jumlah perkebunan/unit yang dikelola sebanyak 43 kebun dan 2 unit rumah sakit, menempati lahan seluas 118.518 Ha yang tersebar di 11 Kabupaten Propinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Dan perinciannya adalah sebagai berikut :

Kebun/Unit dan bagian/wilayah :

- Kantor Direksi : 12 Bagian
- Kebun : 43 Kebun
- Rumah Sakit : 2 Unit
- Inspektur Wilayah : 4 Inspektur Wilayah

Jumlah pabrik pengolahan 75 buah, terdiri dari :

- Pabrik teh : 31 buah
- Pabrik Karet : 35 buah
- Pabrik CPO : 1 buah
- Pabrik Kina : 2 buah
- Pabrik Kakao : 6 buah
- Pabrik Gutta Percha : 1 buah

Areal yang dikelola oleh PTP. Nusantara VIII 118.518 Ha, terdiri dari areal tanaman 68.045 Ha dan areal lainnya 50.473 Ha. Lokasi dari areal tersebut berada diantara 100 s.d 2.200 M di atas permukaan laut yang cocok untuk ditanami berbagai komoditi. Hal ini merupakan salah satu kekuatan Sumber Daya Alam yang dimilki oleh perusahaan.

Dari areal yang ditanami sebagian besar adalah the dan karet masing-masing seluas 25.741 Ha dan 28.309 Ha. Sedangkan komoditi lainnya masing-masing kina 3.888 Ha, kakao 4.822 Ha (termasuk intercrop 486 Ha), Gutta Percha 714 Ha, dan kapala sawit 5.057 Ha.

Dalam rangka diversifikasi produk teh olahan, PTP. Nusantara VIII tidak hanya memproduksi teh hitam dengan berbagai grade, tetapi saat ini telah merintis memproduksi Teh Hijau Jepang dari kloon Yabukita yang diolah secara khusus, berbeda dengan pengolahan teh hijau konvensional meupun teh hitam.

3.1.3 Struktur Organisasi PTP.Nusantara VIII

PTP. Nusantara VIII dikelola dan dipimpin oleh suatu Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ir. Koentadi Hadinoto
- Komisaris : Mayjen TNI Purn. Abdul Nurhaman, SIP, S.sos
- Komisaris : Dr. Ir. Dudung Abdul Adjid
- Komisaris : Dr. Drs. Sohadji
- Komisaris : Drs. Rudy Suyoto, MA.

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Ir. H. Sugiat
- Direktur Produksi : Ir. H. Iman Santoso, SE.
- Direktur Keuangan : Dr. H. Dudung Suryana, SE., Ak., MBA.
- Direktur SDM/Umum : Ir. H. Imam Wahyudi
- Direktur Pemasaran : H. Suwadji Munawar

Kekuasaan tertinggi berada di tangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Tingkat Kepala Seksi

Sejalan dengan perubahan struktur organisasi PTPN VIII, ada seksi di bagian-bagian yang dapat dilebur/digabung dan dijabat oleh seorang Kepala Seksi. Seksi-seksi yang ada adalah sebagai berikut :

No.	Bagian	Seksi
1.	Manajer Wilayah membawahi	1. Urusan tanaman 2. Urusan teknik dan teknologi 3. Urusan administrasi, keuangan, dan umum
2.	Kepala Bagian Pengawasan *Intern membawahi*	1. Seksi pengawasan keuangan 2. Seksi pengawasan operasional 3. Seksi pengawasan kompuerisasi 4. Seksi analisa dan evaluasi
3.	Kepala Bagian Tanaman membawahi	1. Seksi pemeliharaan tanaman teh, kina, dan K3SG (karet, kakao, kelapa sawit dan gutta percha) 2. Seksi panen tanaman 3. Seksi proteksi dan pemupukan
4.	Kepala Bagian Teknologi membawahi	1. Seksi teknologi teh, kina dan K3SG 2. Seksi pengendalian mutu

5.	Kepala Bagian Teknik membawahi	1. Seksi mesin dan instalasi 2. Seksi sipil dan transportasi
6.	Kepala Bagian Keuangan membawahi	1. Seksi tata usaha keuangan 2. Seksi asuransi 3. Seksi pajak
7.	Kepala Bagian Akuntansi membawahi	1. Seksi tata buku induk 2. Seksi anggaran investasi 3. Seksi anggaran eksploitasi 4. Seksi persediaan
8.	Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen Membawahi	1. Seksi pengembangan sistem informasi manajemen 2. Seksi pengolahan data dan pelaporan
9.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Membawahi	1. Seksi personalia 2. Seksi kesejahteraan 3. Seksi pengembangan SDM
10.	Kepala Bagian Pengembangan Usaha membawahi	1. Seksi pengembangan sumber daya 2. Seksi pengembangan teknologi 3. Seksi administrasi proyek

11.	Kepala Bagian Sekretatiat membawahi	1. Seksi sekretariat 2. Seksi pembinaan usaha kecil dan koperasi 3. Seksi urusan dalam
12.	Kepala Bagian Humas dan Hukum Membawahi	1. Seksi hukum dan hak agraria 2. Seksi komunikasi dan penyuluhan
13.	Kepala Bagian Pemasaran Membawahi	1. Seksi adsi. Pemasaran teh, kina, K3SG 2. Seksi adsi. Persediaan teh, kina, K3SG
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi	1. Seksi pengadaan barang dan jasa sarana produksi 2. Seksi pengadaan barang dan jasa sarana penunjang

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja seluruhnya 73.444 orang dengan rincian sebagai berikut :

Status/Jabatan	Akhir Triw II/1998	RKAP 1998
Direksi	5 orang	5 orang
Pegawai Staf		
• Inspektur Wilayah	4 orang	4 orang
• Kepala Bagian	12 orang	12 orang
• Administratur/Kepala RS	45 orang	44 orang
• Kepala Urusan	31 orang	39 orang
• Sinder Kepala	40 orang	43 orang
• Staf lainnya	464 orang	464 orang
Jumlah Staf	596 orang	606 orang
Karyawan Bulanan	3.450 orang	3.374 orang
Karyawan Harian Tetap	29.208 orang	29.181 orang
Jumlah Tenaga Tetap	33.254 orang	33.161 orang
Karyawan Honor/Lepas/Borong	40.190 orang	28.789 orang
Jumlah Tenaga Kerja	73.444 orang	61.950 orang

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
NERACA
PER 31 DESEMBER 1997 DAN 31 DESEMBER 1998

Uraian	31 Desember 1997	31 Desember 1998	Uraian	31 Desember 1997	31Desember 1998
AKTIVA			PASSIVA		
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas daan bank	29.805.199.233	42.399.430.053	Biaya yml dibayar	21.926.471.106	37.092.445.809
Deposito	1.174.168.609	410.558.451.043	Hutang pajak	12.058.455.640	149.656.438.905
Surat berharga	0	1.063.503.000	Hutang niaga	2.070.499.643	7.708.769.958
Piutang niaga	43.971.756.263	91.882.065.932	Hutang bunga	155.996.051	297.042.294
Piutang lain-lain	2.557.152.817	5.689.511.990	Uang muka penjualan	15.438.206.999	37.393.657.030
Uang muka pengadaan	602.146.417	3.661.635.079	Hutang lain-lain	2.543.565.441	6.798.943.065
Piutang pegawai	2.540.002.912	2.018.763.018	Iuran dana pensiun	462.438.303	3.472.418.323
Persediaan hasil produksi	25.340.402.838	72.170.304.041	Hutang jangka panjang jatuh tempo	3.878.513.066	2.452.312.714
Persediaan barang bahan	10.130.615.529	27.468.475.625	Hutang antar badan hukum	1.609.152.257	437.953.694
Biaya dibayar dimuka	1.107.925.091	3.979.095.834	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	60.143.298.506	245.309.981.792
Pajak dibayar dimuka	3.194.210.601	2.737.074.657			
Pendapatan yang diterima	0	6.915.991.946			
Piutang antar badan hukum	906.295.471	578.089.474	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Jumlah Aktiva Lancar	121.389.875.781	671.122.391.692	Hutang jangka panjang	92.691.020.293	57.176.778.880
PENYERTAAN	13.487.624.395	7.674.121.395			
			HAK SAHAM MINORITAS	0	0
AKTIVA TETAP					
Nilai perolehan	610.173.988.077	686.273.079.090	MODAL DAN CADANGAN		
Akumulasi penyusutan	(249.641.216.451)	(278.038.344.941)	Modal dasar	600.000.000.000	600.000.000.000
Jumlah Aktiva Tetap (netto)	360.532.771.626	408.235.734.149	Modal yang belum ditempatkan	(330.000.000.000)	(330.000.000.000)
			Modal disetor	270.000.000.000	270.000.000.000
AKTIVA LAIN-LAIN			Cadangan umum	107.073.743,486	116.798.798.157
Proyek dalam penyelesaian	187.418.892	11.010.875.396	Laba(rugi) tahun berjalan	24.975.909.406	431.638.041.528
Persemaian	2.218.265.548	6.161.516.507	Jumlah Modal dan Cadangan	402.049.652.892	818.436.839.685
Reboisasi (net)	3.008.508.112	3.614.249.556			
Aktiva yang belum digunakan	0	1.073.833.800			
Aktiva lainnya	0	5.750.000.000			
Aktiva tidak produktif	99.342.295.005	93.923.090.554			
Amortisasi aktiva tidak produktif	(45.282.787.718)	(87.642.221.692)			
Jumlah Aktiva Lain-lain	59.473.699.889	33.891.353.121			
Jumlah Aktiva	554.883.971.691	1.120.923.600.357	Jumlah Passiva	554.883.971.691	1.120.923.600.357

TABEL 1 (Neraca PTP.Nusantara VIII)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
PERHITUNGAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 1996, 1997 DAN 31 DESEMBER 1998

URAIAN	31 DESEMBER 1997 (Rp)	31 DESEMBER 1998 (Rp)
PENJUALAN		
Penjualan Ekspor	202.247.524.440	711.733.551.947
Penjualan Lokal	120.734.141.991	263.563.722.854
Jumlah Penjualan	322.981.666.431	975.297.274.801
HARGA POKOK PENJUALAN	235.977.181.990	355.067.617.288
Laba Kotor	87.004.484.441	620.229.657.513
BIAYA USAHA		
Biaya Penjualan	12.203.899.422	15.275.805.514
Biaya umum dan Administrasi	12.757.375.153	17.227.304.360
Jumlah Biaya Usaha	24.961.274.575	32.503.109.874
LABA (RUGI) USAHA	62.043.209.866	587.726.547.639
PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain	70.044.077.740	151.551.425.587
Biaya Lain-lain	(91.660.708.800)	(154.465.234.698)
Jumlah pendapatan dan biaya lain-lain	(21.616.631.060)	(2.913.809.111)
LABA (RUGI) SEBELUM PPH BADAN	40.426.578.806	584.812.738.528
PPH BADAN	15.450.669.400	153.174.697.000
LABA BERSIH	24.975.909.406	431.638.041.528

TABEL 2
Laporan rugi-laba PTP.Nusantara VIII